

ABSTRAK

Pada proses persidangan perkara pidana sering dijumpai orang tidak mampu berkedudukan sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana yang mewajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak bisa secara maksimal mempergunakan hak-haknya selama proses persidangan karena penasihat hukum yang telah ditunjuk tidak melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap terdakwa. Dalam perkara perdata, orang tidak mampu bertindak sebagai Penggugat/Tergugat/Pemohon tidak mengerti proses beracara dan tidak dapat menyusun argumen dalam rangka meneguhkan haknya dikarenakan tidak mempunyai keahlian. Penyelesaian permasalahan hukum yang dibantu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri membawa sejumlah keuntungan dan manfaat, namun disamping itu juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak efektif dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri serta melakukan rekonstruksi hukum terhadap pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri dalam menjamin akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil berbasis keadilan bermartabat.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme dan penelitian ini bersifat deskriptif dengan dilengkapi penelitian eksploratif dan eksplanatori, dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dilengkapi penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan sosiolegal (*sosiolegal studied*). Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui pengamatan dan wawancara sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian, karya ilmiah, dan lain-lain yang relevan. Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis interaktif oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. Sedangkan analisis data sekunder menggunakan metode logika deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan upaya dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dan perwujudan memanusiakan manusia, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Penelitian ini juga menghasilkan rekonstruksi hukum yang terdiri dari rekonstruksi nilai yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana pada butir-butir Pancasila dalam sistem hukum meliputi : substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum antara lain dengan melakukan harmonisasi perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum agar tidak tumpang tindih, melakukan peningkatan kesadaran dan komitmen berupa integritas dan kredibilitas serta akuntabilitas aparat penegak hukum serta melakukan penyuluhan hukum dan pendidikan hukum serta mendorong terbangunnya komitmen dalam pemberian dan pemenuhan hak atas bantuan hukum, serta rekonstruksi yuridis yaitu perlunya penegasan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, berkaitan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap perkara yang mewajibkan untuk didampingi penasihat hukum/kuasa hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pelayanan bantuan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Kata-kata kunci: Rekonstruksi Hukum, Pos Bantuan Hukum, Keadilan Bermartabat

ABSTRACT

On the process of criminal trials often encountered people not able to serves as the defendant who was charged with committing a criminal offence criminal threats that require to obtain legal aid free of charge could not be optimally applying his rights during the process of the trial because of the legal adviser has been appointed not doing mentoring and advocacy against the defendant. In the case of the civil code, a person is not capable of acting as the plaintiff/Defendant/Appellant did not understand the process of beracara and can not compile the arguments in order to establish its rights due to not having any expertise. The resolution of legal issues assisted legal aid Post (Posbakum) District Court brings a number of advantages and benefits, but besides that there are also weaknesses in its implementation. This research aims to analyze and explain the implementation of legal aid services in Posbakum District Court in an attempt to realize the fulfillment of the right to legal aid is not effective and the weaknesses in the implementation of services Posbakum District Court as well as the reconstruction of law against Posbakum District Court in ensuring access to justice and a fair judicial justice based justice dignity.

The paradigm that is used in this research is the constructivism and research is descriptive and exploratory research is equipped with eksplanatori, using this type of empirical legal research complemented the normative legal research with the method of approach sosiolegal (sosiolegal studied). Source of research data obtained from dara primary and secondary. To collect primary data is done through observation and interviews while the secondary is done to obtain data by studying the legislation, jurisprudence, research results, scientific works, dictionaries, and others that are relevant. Analysis of the primary data using interactive analysis techniques by Matthew b. Miles & a. Michael Huberman. While secondary data analysis using the method of inductive and deductive logic.

The results of this study indicate that the purpose of the granting of legal assistance to the community could not afford to is an attempt to meet the constitutional rights of citizens and the embodiment of humanizing mankind, that respect for the dignity and the dignity of someone. This research also produced the reconstruction of law comprising the reconstruction value i.e. applying the values of Pancasila as on the details of Pancasila in the legal system include: the substance of the law, legal culture, legal structure, among others by performing the harmonization of legislation governing legal aid so as not to overlap, increasing awareness and commitment in the form of integrity and credibility as well as the accountability of law enforcement officers as well as conduct outreach law and legal education and encourage harmonious commitment in awarding and fulfillment of the right to legal assistance, as well as the reconstruction of juridical, namely the need for discernment in Act No. 16 of the year 2011 about legal aid as well as the rules of the Supreme Court No. 1 year 2014 of the guidelines the granting of legal services for the community, not being able to berkaitam the obligation of granting legal assistance against things which require to be accompanied by legal counsel/legal powers which can be exercised by the legal aid service in the Posbakum District Court until the matter has been measured.

Key words : Reconstruction of law, Post Legal Aid, Justice Dignity